

**PENGARUH PERENCANAAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi**

OLEH :

IWAN REZEKY
NPM : 1702110152



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 25 September 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

IWAN REZEKY
NPM : 1702110152

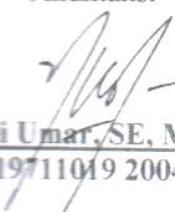
Dengan judul:

**PENGARUH PERENCANAAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I



Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak. CA.
NIK. 19590217 199101 1 001

Pembimbing II



Yusliana, SE, M.Si
NIK. 19650310 199307 200 1

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 25 September 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

IWAN REZEKY
NPM : 1702110152

Dengan judul:

**PENGARUH PERENCANAAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 31 Agustus 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak. CA.
NIK. 19590217 199101 1 001

Anggota

Yusliang, SE, M.Si
NIK. 19650310 199307 200 1

Anggota

Elviza, SE, M.Si.
NIK. 19840405 201112 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU"

Banda Aceh, 25 September 2022

Yang Menyatakan



IWAN REZEKY

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Iwan Rezeky
NPM : 1702110152
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH PERENCANAAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 25 September 2022

Banda Aceh, 25 September 2022

Yang Menyatakan



IWAN REZEKY

KATA PENGANTAR

Ya Allah terima kasih atas karunia-Mu hari ini dan semoga aku menjadi hamba-Mu yang tidak lupa bersyukur. Syukur Alhamdulillah keharibaan Mu ya Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak luput penulis menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan melalui ajaran agama Islam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak, CA selaku pembimbing pertama dan Yusliana, SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini selesai. Ucapan terima kasih yang sama juga penulis sampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ayahanda dan Ibunda atas segala doa, semangat, ridho, kasih sayang yang selalu tercurah sehingga penulis selalu diberikan keberkahan dalam menjalani kehidupan khususnya dalam menyelesaikan karya tulis ini.
2. Bapak Drs. Tarmizi, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh beserta Staf Pengajar.
4. Bendaharawan, Kepala Subbagian Keuangan dan Sekretaris di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang telah berkenan mengisi kuesioner.

5. Spesial buat keluarga besar di Kabupaten Aceh Tengah yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materiil selama penulis melaksanakan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh.
6. Buat sahabat-sahabat se-angkatan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun dalam pembahasannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga Allah SWT akan membalasnya dikemudian hari.
Amin ya Rabbal A'lamin.

Banda Aceh, 13 September 2023
Penulis

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
ABSTRAK	vi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	11
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	 12
2.1 Landasan Teoritis.....	12
2.1.1 Anggaran Sektor Publik	12
2.1.1.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik	12
2.1.1.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik	14
2.1.2. Penyerapan Anggaran.....	16
2.1.2.1 Pengertian Penyerapan Anggaran	16
2.1.2.2 Faktor-faktor Yang Menentukan Penyerapan Ang- garan	18
2.1.2.3 Indikator Penyerapan Anggaran	21
2.1.3 Regulasi.....	21
2.1.3.1 Pengertian Regulasi.....	21
2.1.3.2 Manfaat dan Tujuan Regulasi	22
2.1.3.3 Indikator Regulasi	23
2.1.4 Politik Anggaran	24
2.1.4.1 Pengertian Politik Anggaran	24
2.1.4.2 Indikator Politik Anggaran	25
2.1.5 Pengadaan Barang dan Jasa	26
2.1.5.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa.....	26
2.1.5.2 Indikator Pengadaan Barang dan Jasa	30
2.2 Penelitian Sebelumnya.....	31
2.3 Kerangka Pemikiran.....	34
2.4 Hipotesis	35
 BAB III METODE PENELITIAN	 36
3.1 Desain Penelitian	36
3.1.1 Tujuan Penelitian	36
3.1.2 Jenis Penelitian.....	36

3.1.3 Horizon Waktu.....	36
3.1.4. Unit Analisis	37
3.2 Populasi dan Sampel.....	37
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.4 Operasional Variabel	39
3.5 Teknik Analisis Data.....	41
3.6 Pengujian Data.....	41
3.6.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas	41
3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik.....	43
3.7 Pengujian Hipotesis	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36
4.1. Karakteristik Responden.....	40
4.2. Deskriptif Variabel Penelitian.....	41
4.2.1 Variabel Penyerapan Anggaran	41
4.2.2 Variabel Regulasi.....	43
4.2.3 Variabel Politik Anggaran	44
4.2.4 Variabel Kompetensi SDM.....	46
4.3. Hasil Pengujian Data.....	48
4.3.1 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas.....	48
4.3.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik	51
4.4. Pembahasan.....	54
4.4.1 Koefisiene Regresi	54
4.4.2. Koefisien Korelasi dan Determinasi	55
4.4.3. Pengujian Hipotesis	56
4.4.4.1 Pengujian Secara Parsial	56
4.4.4.2 Pengujian Secara Simultan	58
4.6. Implementasi Hasil Penelitian	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran-saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	31
Tabel 3.1 Horizon Waktu	37
Tabel 3.2 Populasi dan Sampel.....	38
Tabel 3.3 Skala Pengukuran	39
Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel	39
Tabel 4.1. Karakteristik Responden.....	44
Tabel 4.2. Gambaran Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah	46
Tabel 4.3. Gambaran Tingkat Perencanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah	47
Tabel 4.4. Gambaran Kualitas SDM Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah	49
Tabel 4.5. Gambaran Tingkat Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah	51
Tabel 4.6. Hasil Uji Reliabilitas	53
Tabel 4.7. Hasil Uji Reliabilitas	54
Tabel 4.8. Hasil Uji Multikolinearitas.....	52
Tabel 4.9. Hasil Analisis Model Regresi Linier Berganda	55
Tabel 4.10. Hasil Analisis Korelasi dan Diterminasi	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	34

**PENGARUH PERENCANAAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KABUPATEN ACEH TENGAH**

OLEH

NAMA : IWAN REZEKY
NIM : 1502110304

Pembimbing :

1. Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si
2. Budi Safatul Anan, SE, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh perencanaan, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran secara simultan terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah Sekretaris, kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendaharawan pada seluruh SKPD di Kabupaten Aceh Tengah yang berjumlah sebanyak 81 pejabat atau masing-masing SKPD mewakili 3 responden. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sensus yaitu dengan mengambil seluruh populasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah informasi yang di kumpulkan langsung dari responden dengan menggunakan kuesoner tertutup. Hasil penelitian menjelaskan perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah. Kualitas SDM berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah. Pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah. Secara simultan perencanaan anggaran, kualitas SDM dan pelaksanaan anggaran pengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah.

Kata kunci: perencanaan, kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberadaan pemerintah daerah sebagai sub sistem dari pemerintah pusat merupakan sesuatu yang penting bagi proses kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa keberadaan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu pemerintah daerah melalui kebijakan dan program kerja yang dilaksanakan oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di bawah kewenangannya hadir dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Pemerintah berkewajiban memajukan kesejahteraan masyarakat melalui anggaran negara maupun anggaran daerah yang sumber penerimaannya sebahagian besar berasal dari pajak. Anggaran pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana program kegiatan yang direpresentasikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja daerah dalam satuan moneter (Bastian, 2017:69). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang penting sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah (Rindawati, 2021:1)

APBD menjadi bagian dari kebijakan publik yang memuat pilihan pemerintah daerah tentang sejumlah pilihan mengenai penggunaan keuangan daerah. APBD akan berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengawasan, sebagai alat alokasi dan

distribusi keuangan untuk berbagai bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta berfungsi sebagai alat stabilitas dalam upaya memelihara dan mengupayakan fundamental ekonomi negara maupun daerah (Nasution, 2019:35). Dengan format tersebut maka penyerapan anggaran menjadi stimulus dalam meningkatkan tanggung jawab dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara di seluruh Indonesia.

Penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut dalam satu tahun anggaran. Penyerapan anggaran yang akuntabel dan memenuhi prinsip *value of money* merupakan salah satu penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi ukuran kinerja pemerintah (Ramdhani dan Indi, 2017). Namun berbagai hambatan telah timbul dalam penyerapan anggaran publik di berbagai daerah Indonesia seperti terjadinya keterlambatan pencairan anggaran maupun kondisi kegagalan SKPD dalam memenuhi target anggaran dalam tahun anggaran. Kondisi ini telah dan akan terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Aceh Tengah.

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu perangkat daerah otonom di Provinsi Aceh yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik tersebut didukung oleh 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 12 Dinas, 8 Badan, 6 Kantor dan 2 Sekretariat (Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 2019). Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pembangunan dan pelayanan publik, setiap SKPD di Kabupaten Aceh Tengah akan terlibat dalam penyusunan anggaran dan kemudian digunakannya seluruh mata anggaran yang telah direncanakan secara efisien dan efektif dalam proses tahapan

pelaksanaan anggaran. Hasilnya pencairan atau penyerapan anggaran melalui SKPD di Kabupaten Aceh Tengah telah berimplikasi luas terhadap kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.

Penyerapan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap tahun telah menunjukkan ukuran dan upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Tengah dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Namun masalahnya berbagai hambatan juga dihadapi pemerintah di Kabupaten ini dalam penggunaan dan pencairan anggaran. Dari aspek regulasi, rendahnya penyerapan anggaran di sebabkan oleh lambatnya penetapan APBD. Penetapan APBD rata-rata baru dilakukan pada Bulan April setiap tahun anggaran. Lambatnya penetapan APBD juga diperparah oleh kualitas perencanaan yang kurang baik. Proyek-proyek yang diusulkan banyak yang kurang jelas dan kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus menterjemahkan lagi proyek-proyek yang tidak jelas. Kemudian proses panjang birokrasi pengelolaan keuangan termasuk keterlambatan petunjuk teknis dan berbelitnya prosedur pelaksanaan anggaran juga menjadi beberapa masalah yang sering menghambat penyerapan anggaran di berbagai daerah (Sinaga, 2018). Banyak faktor yang ikut mempengaruhi penyerapan anggaran di organisasi pemerintah daerah termasuk diantaranya adalah perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran (Ramdhani dan Indi, 2017)

Perencanaan merupakan salah satu unsur dari fungsi manajemen pemerintahan. Untuk melaksanakan program kerja dan program kegiatan, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah harus menyusun dan mengajukan rencana anggaran yang sistematis berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sehingga

semua SKPD memiliki arah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun anggaran kedepan. Dengan menyusun dan mengajukan perencanaan maka Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah akan memiliki anggaran daerah sebagai pedoman bagi manajemen pemerintah dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.

Perencanaan adalah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU No. 25 Tahun 2004). Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, perencanaan berintegrasi dengan penganggaran sebab *output* dari perencanaan adalah DPA yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan oleh SKPD di Kabupaten Aceh Tengah selama tahun anggaran, sehingga keberhasilan realisasi anggaran oleh SKPD dimulai dari tahapan adanya perencanaan yang sistematis. Namun kecenderungan yang terjadi pada tahap perencanaan adalah ketidaktepatan dalam perencanaan atau penyusunan anggaran sehingga SKPD di Kabupaten Aceh Tengah sering menghadapi tindakan revisi terhadap DIPA.

Adanya kecenderungan mengajukan usulan anggaran yang lebih besar dari yang dibutuhkan dengan anggapan bahwa usulan tersebut nantinya tidak akan disetujui semua, lemahnya kemampuan pejabat daerah dalam membuat perencanaan yang inovasi dan berkualitas serta adanya kecenderungan untuk memperbesar alokasi anggaran untuk belanja pegawai sering membuat SKPD di Kabupaten Aceh Tengah menghadapi tindakan revisi terhadap DIPA. Adanya kecendrungan Revisi DIPA tersebut menyebabkan jadwal kegiatan harus dilakukan penyesuaian, dan waktu pelaksanaan menjadi mundur. Akibatnya kegiatan dan program kerja belum dapat dilaksanakan sebelum persetujuan revisi DIPA tersebut disahkan, karena kegiatan dan program tersebut dapat dikategorikan belum ada alokasi anggaran akhirnya sering

terjadi sisa anggaran yang tidak sempat lagi digunakan pada akhir tahun (Ratag et al., 2019).

Perencanaan keuangan daerah yang berkualitas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak hanya memberi dampak dan manfaat bagi pembangunan daerah dan kemakmuran masyarakat, namun Satuan Kerja Perangkat Daerah akan lebih mudah melaksanakan dan merealisasikan anggaran untuk program kerja dan program kegiatan yang telah dilaksanakan. Perencanaan yang berkualitas dan prioritas juga akan membuat Badan Legislatif di Kabupaten Aceh Tengah akan dapat lebih cepat melakukan penetapan dan mengesahkan APBD sebagai rekapitulasi program kerja anggaran yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Kondisi tersebut akan dapat menghilangkan hambatan teknis yang sering terjadi dalam realisasi anggaran oleh SKPD di Kabupaten Aceh Tengah. Perencanaan yang akurat akan memudahkan tahap pelaksanaan anggaran dan memungkinkan tercapainya target secara efektif. Sebaliknya, ketidaktepatan dalam perencanaan mengakibatkan sulitnya pelaksanaan anggaran yang berdampak pada lambatnya proses penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran. Perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran (Ratag et al., 2019).

Selain perencanaan, kualitas sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor yang ikut mempengaruhi penyerapan anggaran di Kabupaten Aceh Tengah. Kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur adalah potensi diri para bendaharawan dan pejabat, mencakup pengetahuan mereka, etos kerja, sikap, keahlian, kesehatan, kedisiplinan, loyalitas kerja dan kejujuran. Sumber Daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang bukan hanya memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaannya, melainkan juga untuk mengembangkan dirinya serta mendorong pengembangan diri rekan-rekannya

(Matindas dalam Almalani, 2019). SDM aparatur yang berkualitas adalah sumber daya yang memenuhi kriteria kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual (pengetahuan dan keterampilan), dan kualitas mental spiritual (kejuangan) (Danim (1996) dalam Almalani, 2019).

Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien mulai dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran memang membutuhkan pejabat pengelolaan keuangan yang memiliki wawasan, kemampuan dan kompetensi yang baik di sepanjang struktur organisasi pemerintah di Kabupaten Aceh Tengah. Namun dalam realita tidak semua pejabat daerah di lingkungan kerja Kabupaten Aceh Tengah yang terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran memiliki perilaku, kemampuan, kompetensi dan wawasan sesuai yang diinginkan. Kondisi tersebut nampak jelas dari fakta dimana perencanaan yang di buat sering lebih besar dari kemampuan SKPD untuk merealisasikannya dan bahkan sebahagian dari pejabat tidak mampu melaksanakannya karena kurangnya ide-ide serta program kerja yang menjadi sasaran strategi pada bidang kerjanya terkadang tidak sesuai dengan kompetensi pejabat. Kondisi ini membuat SKPD tidak mampu merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan.

Sistem pengembangan Aparatur Sipil Negara sedemikian rupa oleh Pemerintah Pusat selama satu dasawarsa sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan kemudian diberlakukannya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, memang telah melahirkan berbagai konsep dan gagasan baru dalam meningkatkan kompetensi pejabat termasuk didalamnya disiplin dan kinerja pegawai di Kabupaten Aceh Tengah. Namun pengembangan tersebut belum cukup optimal dapat meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam pengelolaan keuangan

daerah. Promosi dan pengangkatan seorang pejabat untuk menduduki pimpinan eselon II maupun III yang penuh dengan koneksitas dan sering dilakukan secara subjektif membuat kemampuan dan kompetensi pejabat sering tidak sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya terdapat sejumlah pejabat yang tidak mampu membuat perencanaan anggaran sesuai sumber daya instansi dan sering membuat mereka memiliki rasa ketakutan yang berlebihan dalam menggunakan anggaran. Bahkan ada sebahagian pejabat pelaksana kegiatan dan pengguna anggaran sangat berhati-hati dan enggan untuk membelanjakan anggarannya sesuai dengan rencana. Lemahnya kemampuan mereka sering membuat mereka takut salah dalam penggunaan anggaran yang berakibat pada masalah hukum dan pidana. Jika ada program kerja yang diwujudkan pelaksanaannya penuh kehati-hatian yang menyebabkan proses pelaksanaan anggaran terhambat karena adanya berbagai macam pertimbangan termasuk pemeriksaan ulang yang memakan waktu lama (Alfayuni dan Neneng, 2021). Kualitas Sumber Daya Manusia pejabat daerah merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Semakin baik Kualitas Sumber Daya Manusia pejabat daerah maka semakin baik tingkat penyerapan anggaran (Anisa, 2017).

Selain kualitas SDM dan perencanaan , penyerapan anggaran juga dipengaruhi pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang mulai berjalan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Dimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disingkat dengan DPA SKPD telah disahkan dan anggaran/uang negara maupun uang daerah untuk pelaksanaan program kegiatan SKPD dalam bentuk pagu anggaran telah tersedia dalam rekening kas negara maupun daerah pada bank pemerintah yang di tunjuk di Kabupaten Aceh Tengah.

Pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan oleh SKPD di Kabupaten Aceh Tengah untuk merealisasikan semua rencana dari program kerjanya dengan dukungan uang negara/daerah yang telah tersedia dalam rekening kas negara maupun daerah pada PT. Bank Aceh Syariah atau bank BUMN lainnya yang telah di tunjuk. Kegiatan ini diwujudkan dengan pengadaan barang dan jasa oleh masing-masing SKPD. Misalnya Dinas Pendidikan mulai membangun dan mengembangkan sejumlah sarana dan prasarana Pendidikan termasuk laboratorium dan pengadaan buku untuk perpustakaan. Dinas Kesehatan mulai membeli peralatan medis termasuk obat-obatan dan peralatan non medis lainnya melalui proses pengadaan barang dan jasa. Begitu juga dengan instansi-instansi lainnya. Namun dalam pelaksanaan anggaran, SKPD di Kabupaten Aceh Tengah sering dihadapang oleh persoalan-persoalan teknis, struktural maupun situasional seperti keterlambatan penetapan surat keputusan tenaga pengelola keuangan, buruknya budaya kerja pemerintah seperti kebiasaan pengelola administrasi anggaran secara tradisional yang lambat, adanya kecendrungan untuk menunda-nunda pekerjaan karena lemahnya kedisiplinan kerja serta kurangnya tambahan penghasilan yang diharapkan dari kegiatan proyek yang dilaksanakan, serta masalah-masalah administrasi lainnya yang ditimbulkan oleh situasi kerja. Kondisi ini akan membuat jadwal pelaksanaan anggaran terganggu dan menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran (Ratag, et al., 2019).

Pejabat daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Tengah telah menyusun program kerja secara gemilang dengan dukungan anggaran yang telah disediakan. Namun dalam realita seluruh rencana kerja yang telah disusun oleh SKPD tersebut dalam pelaksanaannya sering tidak tercapai secara optimal dan bahkan ada sejumlah program kerja yang direalisasikan sering tidak sesuai dengan yang seharusnya

diharapkan. Keberhasilan pelaksanaan anggaran oleh SKPD di Kabupaten Aceh dapat disebabkan oleh masalah internal yang terjadi pada masing-masing satuan kerja. Namun faktor pengadaan barang dan jasa sering disebutkan sebagai salah satu penyebab utama pelaksanaan anggaran tidak tepat waktu (Alfayuni dan Neneng, 2021). Kehati-hatian pejabat pengadaan barang/jasa dalam mengambil tindakan dalam proses pengadaan barang/jasa serta keengganan pegawai ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sering berdampak terhadap lambatnya penyerapan anggaran (Ratag, et al., 2019). Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Semakin baik pelaksanaan anggaran maka akan semakin baik tingkat penyerapan anggaran (Anisa, 2017).

Berdasarkan uraian masalah sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pengaruh Perencanaan, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

3. Apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
4. Apakah perencanaan, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran berpengaruh secara simultan terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan usraian rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh perencanaan secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kualitas sumber daya manusia secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pelaksanaan anggaran secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh perencanaan, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran secara simultan terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah .

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Memberikan informasi aktual bagi masyarakat ilmiah berkenaan dengan penelitian lanjutan dan pengembangan ilmu akuntansi sektor publik melalui tersedianya bahan referesi yang berkaitan dengan pengaruh perencanaan, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

2. Praktis

- a. Memberikan suatu keputusan yang aktual bagi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam meningkatkan penyerapan anggaran.
- b. Meningkatkan kemampuan aplikasi teori yang lebih baik bagi penulis.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada variabel perencanaan, kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran dan penyerapan anggaran dengan objek penelitian adalah pejabat yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Anggaran Sektor Publik

2.1.1.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran adalah perencanaan keuangan SKPD untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran berisi estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran juga menjadi rencana kerja (*plan for action*) bagi para pejabat untuk mencapai tujuan dari program kerja pemerintah. Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Mardiasmo, 2018:77).

Menurut *National Committee on Goversimental Accounting* (NGGA) yang saat ini telah menjadi *Govermental Accounting Standards Board* (GASB) yang dikutip dalam Bastian (2017:164) mendefinisikan anggaran (*budget*) sektor publik adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estirnasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Menurut Yuliani (2019:27) anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estetika kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran financial. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, namun juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

Lebih lanjut Mardiasmo (2018:61) menyatakan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Kemudian Nurkholis dan Khusaini (2019:1) penganggaran Sektor Publik menjelaskan konsep penganggaran dan anggaran adalah:

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan dan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang disusun.

Hantono et al., (2021:40) anggaran sektor publik adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resource to unlimited demands*). Sedangkan Freeman dan Shoulders (2003) juga dalam Hantono et al., (2021:40) menyatakan anggaran adalah *The process of allocating resources to unlimited demands* (Proses pengalokasian sumber daya untuk permintaan yang tidak terbatas). Pada entitas sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dibandingkan entitas pada privat anggaran umumnya bersifat rahasia internal perusahaan

Dengan demikian anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2018:76) adalah sebagai berikut:

suatu rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja);
- b. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Menurut Bastian (2017:166) anggaran sektor publik tersebut pada umumnya memiliki beberapa karakteristik adalah :

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran di telaah dan disetujui oleh pihak yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran
5. Sekali disetujui anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.1.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Penganggaran dalam sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan penuh dengan nuansa politik, karena anggaran sektor publik merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana publik untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan lainnya (Sujatmika, 2020: 2). Dengan demikian anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama : 1. Sebagai alat perencanaan 2. alat pengendalian 3. alat kebijakan fiskal 4. alat politik 5. alat koordinasi dan komunikasi 6. alat penilaian kinerja 7. alat motivasi (Nurkholis dan Khusaini (2019:6).

Anggaran memiliki fungsi yang multidimensional dalam organisasi. Menurut Mardiasmo (2018:63) fungsi anggaran secara umum dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Anggaran sebagai alat kebijaksanaan fiskal Pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atau penggunaan dana publik.
5. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pencapaian anggaran.
7. Anggaran sebagai alat untuk emotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomi, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, artinya masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik

Lebih jelas Hantono et al., (2021:43) menjelaskan secara luas fungsi anggaran sektor publik adalah:

1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)
Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:
 - a. merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan
 - b. merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan
 - c. mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
 - d. menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
2. Anggaran sebagai Alat Pengendali (*control tool*)
Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan – pemborosan pengeluaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)
Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.
4. Anggaran sebagai Alat Politik (*Political Tool*)
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan, yaitu sebagai bentuk komitmen eksekutif dan legislatif atas

penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition bulding, keahlian bernegosiasi dan pemahaman prinsip manajemen keuangan sektor publik.

5. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*coordination and communication tool*)

Anggaran publik merupakan alat koordiansi antar bagian, terlihat ketika penyusunan anggaran. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

6. Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Toll*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

7. Anggaran sebagai Alat Motivasi (*Motivasi Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan staf nya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan

Kemudian Bastian (2017:164) menjelaskan beberapa fungsi anggaran adalah:

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dengan bawahan.
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisine dalam pencapaian visi organisasi
6. Anggaran merupakan instrumen politik
7. Anggaran merupakan instrumen fiskal.

2.1.2 Penyerapan Anggaran

2.1.2.1 Pengertian Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran adalah pencapain dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Masyarakat umum menyebutnya dengan pencairan anggaran. Dengan demikian penyerapan anggaran juga dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) pada saat tertentu (Halim, 2017: 84). Mardiasmo (2009:162) dalam Fajar dan Muhammad (2017) mengatakan Penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Secara sederhana penyerapan anggaran dapat diartikan membandingkan pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan anggaran yang telah direalisasikan.

Menurut Noviwijaya & Rohman (2013) dalam Ramdhani dan Indi (2017) penyerapan anggaran pada satuan kerja adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Penyerapan anggaran yang akuntabel dan memenuhi prinsip *value of money* merupakan salah satu penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi ukuran kinerja pemerintah. Kemudian Kuncoro dalam Harahap (2020) mengatakan penyerapan anggaran yaitu “suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target rencana yang telah dicapai oleh instansi”

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja dalam Elim et al., (2018) menyebutkan penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Penyerapan anggaran merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Urbinas (2020) penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Dengan pertimbangan ini maka kemampuan menyerap anggaran oleh pemerintah daerah dapat menjadi indikator kinerja pemerintah kota/kabupaten.

Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, berapa besar yang berhasil dicapai atau diserap. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis simpangan kinerja aktual yaitu serapan dengan yang dianggarkan. Semakin tinggi penyerapan anggaran, maka semakin baik kinerja manajer publik tersebut (Mardiasmo dalam Zulaikah dan Dian (2019). Suatu Pemda (Pemerintah Daerah) seharusnya dapat melakukan penyerapan anggaran secara ideal yaitu penyerapan anggaran yang dilakukan secara merata dari Triwulan I hingga Triwulan IV yang masing-masing triwulannya terserap sebesar 25% dari jumlah anggaran yang ada (BPK (2011) dalam Zulaikah dan Dian (2019).

Penyerapan anggaran yang cenderung rendah di awal tahun berdampak terhadap terjadinya penumpukan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun. Hal tersebut terjadi akibat pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan optimal. Pelaksanaan kegiatan yang tidak berjalan optimal tersebut menyebabkan inkonsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini kurang baik, karena saat ini penyerapan anggaran menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja suatu perangkat daerah. Karena kejadian ini sudah sering terjadi bahkan berulang setiap tahunnya, bisa dikatakan sebagai budaya organisasi karena kejadiannya terus berulang (Handajani dan Effendy, 2018).

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Menentukan Penyerapan Anggaran

Keterlambatan penyerapan anggaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya meliputi kesiapan satuan kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan, pemahaman satuan kerja dalam mekanisme pelaksanaan pencairan

anggaran, proses dalam pengadaan barang dan jasa dan berbagai faktor internal lainnya (Nugroho dan Salman, 2017).

Ani et al., (2020) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1 Kompetensi Sumber Daya Manusia
Salah satu faktor utama yang menentukan baik atau tidak jalannya program kerja pemerintah adalah sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).
- 2 Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa (Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Semakin meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa akan semakin kebutuhan dan realisasi anggaran.
- 3 Komitmen Organisasi
Komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan– tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Sedangkan komitmen organisasi adalah tingkatan dimana seseorang memposisikan dirinya pada organisasi dan kemauan untuk melanjutkan upaya pencapaian kepentingan organisasinya. Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan setiap anggota memberdayakan seluruh kemampuan atau sumber daya yang dimilikinya, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan – pekerjaan besar akan sulit dilaksanakan.
- 4 Perencanaan Anggaran
Perencanaan anggaran adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Semakin berkualitas perencanaan anggaran maka akan semakin realita tingkat pencapaiannya di masa depan tanpa banyak kendala yang dihadapi.

Harahap et al., (2020) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran adalah sebagai berikut

1. Perencanaan Anggaran
2. Pelaksanaan anggaran
3. Pencatatan Administrasi
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia Anisa

Kemudian Ramdhani dan Indi (2017) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada instansi pemerintah terdiri dari:

1. Perencanaan Anggaran
2. Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pelaksanaan Anggaran

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran menurut Elim, et al (2018) adalah sebagai berikut:

- 1 Dokumen perencanaan anggaran
- 2 Pelaksanaan anggaran
- 3 Dokumen pengadaan barang dan jasa
- 4 Komitmen manajemen
- 5 Birokrasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran menurut Ramadhani dan Mia (2019) adalah sebagai berikut:

1. Regulasi,
2. Politik Anggaran
3. Perencanaan Anggaran
4. Sumber Daya Manusia
5. Pengadaan Barang/ Jasa

2.1.2.3 Indikator Penyerapan Anggaran

Indikator yang digunakan terhadap penyerapan anggaran menurut Noviwijaya, Rohman (2013) dan Suhartono (2011) yang dikutip dalam Fajar dan Muhammad (2017). adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran;
2. Konsistensi dalam pelaksanaan program/ kegiatan;
3. Ketepatan jadwal penarikan anggaran

2.1.3 Perencanaan Anggaran

2.1.3.1 Pengertian Perencanaan

Rencana anggaran adalah perhitungan, penentuan dan penetapan nilai moneter pendapatan dan pengeluaran entitas ekonomi dalam satu tahun anggaran yang digunakan sebagai panduan untuk menyisihkan uang dan pembelanjaan. Perencanaan menurut Syafii (2017:81) adalah perhitungan dan penentuan dari pada apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Kemudian menurut Hadiutomo (2021:35), perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu, oleh siapa, dan bagaimana. Perencanaan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang.

Robbins dan Coulter dikutip dari Tisnawati dan Saefullah (2018:98) mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.

Zarinah dalam Harahap (2020) perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Perencanaan anggaran menurut Alumbida dan David (2017) adalah sebagai berikut:

proses pendefinisian tujuan, penentuan strategi untuk mencapai tujuan, dan pengembangan serangkaian rencana komprehensif untuk menggabung dan mengkoordinasi berbagai aktivitas. Perencanaan anggaran adalah proses penyusunan RKA- SKPD dasar penyusunan APBD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD setelah APBD tersebut ditetapkan. Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, perencanaan berintergrasi dengan penganggaran sebab *output* dari perencanaan adalah DPA yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan selama tahun anggaran.

UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional Pasal 1 ayat

(1) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan menurut Arif et.al (2019:517) terbagi dalam perencanaan fisik dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan fisik
Mengenai hal-hal yang akan digunakan atau dihasilkan, baik material maupun barang-barang jasa.
- b. Perencanaan pembiayaan
Mengenai jumlah anggaran yang diperlukan dan besarnya masing-masing kebutuhan anggaran.

2.1.3.3 Tujuan Perencanaan

Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Tidak adanya perencanaan penggunaan anggaran secara riil tentu akan berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran. Kemudian Mardiasmo (2009) dalam Ramdhani dan Indi (2017) menjelaskan anggaran sebagai alat perencanaan di gunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.

- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaannya.
- c. Mengalokasikan dana pada berbagai program kerja/kegiatan yang telah disusun, dan
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2.1.3.2 Indikator Perencanaan

Perencanaan anggaran menurut Syarah, Fitri (2016) dalam Harahap (2020) menggunakan 6 indikator yaitu:

- a. Komprehensif,
- b. Terperinci
- c. Disiplin
- d. Fleksibel
- e. Prioritas
- f. Keterbukaan

Kemudian unsur-unsur perencanaan yang dapat dijadikan indikator perencanaan menurut Arif et.al (2019:516) adalah sebagai berikut:

- 1. Tujuan-tujuan
- 2. Kebijakan
- 3. Prosedur
- 4. Pengembangan
- 5. Program kerja

Perencanaan anggaran menurut Gagola et al (2017) diukur dengan indikator penyusunan RKA, penetapan rancangan APBD, penetapan APBD. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan anggaran menurut Hadiutomo (2021:35) adalah:

- a) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat,
- b) Kinerja yang ingin dicapai.
- c) Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan
- d) Harga satuan yang rasional.

2.1.3 Kualitas Sumber Daya Manusia

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia sebagai kemampuan dari aparatur dalam menjalankan tugasnya dilihat dari kemahiran seseorang, latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan profesionalisme dalam bekerja (Suharto (2012) dalam Ramdhani dan Indi (2017). Sementara kualitas sumber daya manusia menurut Mamik (2018:18) adalah sebagai berikut:

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Daya pikir adalah kecerdasan yang di bawa sejak lahir (modal dasar). Kecerdasan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan ini dapat diukur dari *intelegence quotion* (IQ) dan *emotion quality* (EQ). Daya fisik adalah kemampuan untuk menggunakan kekuatan otot dan memanfaatkan energi maksimal dalam bekerja.

Adapun pengertian kualitas Sumber Daya Manusia menurut Pasolong (2019:5) merupakan tenaga kerja yang memilki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan moral yang tinggi. Kemudian Barthos (2018:5) menjelaskan kualitas sumber daya manusia adalah nilai dari perilaku seseorang dalam mempertanggungjawabkan semua perbuatannya baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Ndraha (1999:12) dalam Sutrisno (2017:4) menjelaskan sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif- generative- inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti *intelligence*, *creativity*, dan *imagination*, tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, energi otot, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2017:59) mengemukakan bahwa “Kualitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah dipenuhi berbagai persyaratan, spesifikasi, dan harapan”. Salim (2016:35) dalam Saptari *et al.*, (2019) mengemukakan pengertian kualitas sumber daya manusia sebagai berikut : kualitas sumber daya manusia adalah nilai dari perilaku seseorang dalam mempertanggungjawabkan semua perbuatannya baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Sony Sumarso (2003:4) dalam Mamik (2018:19) kualitas sumber daya manusia mengandung dua pengertian. Pengertian pertama, kualitas SDM mengandung pengertian kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu dalam menghasilkan barang dan jasa. Pengertian Kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja dalam arti mampu melakukan kegiatan secara ekonomi yaitu barang dan jasa.

2.1.3.2 Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas menurut Mamik (2018:18) memiliki kemampuan terpadu dari daya fikir dan daya fisik yang dimiliki individu.

1. Daya fikir adalah kecerdasan yang di bawa sejak lahir (modal dasar). Kecerdasan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan ini dapat diukur dari *intelegence quotion* (IQ) dan *emotion quality* (EQ).
2. Daya fisik adalah kemampuan untuk menggunakan kekuatan otot dan memanfaatkan energi maksimal dalam bekerja.

Matutina (2001) dalam Ramdhani dan Indi (2017) Kualitas kerja mengacu kepada kualitas sumber daya manusia yang mencakup komponen-komponen berikut :

1. Pengetahuan (*knowledge*) yaitu kemampuan yang dimiliki pegawai lebih berorientasi pada intelenensi dan daya fikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki pegawai.
2. Keterampilan (*skill*) yaitu kemampuan dan penguasaan teknis operasional dibidang tertentu yang dimiliki pegawai.

3. Kemampuan (*ability*) yaitu kemampuan yang terbentuk dari jumlah kompetensi yang dimiliki seseorang karyawan (pegawai) yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab

Karakteristik Kualitas Sumber Daya Manusia menurut Ruky (2003:16) dalam Sutrisno (2017:8) mengatakan bahwa karakteristik atau ciri - ciri SDM yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan penuh tentang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
2. Memiliki pengetahuan (*knowledges*) yang diperlukan, terkait dengan pelaksanaan tugasnya secara penuh.
3. Mampu melaksanakan tugas - tugas yang harus dilakukannya karena mempunyai keahlian/keterampilan (*skills*) yang diperlukan.
4. Bersikap produktif, inovatif/kreatif, mau bekerja sama dengan orang lain, dapat dipercaya, loyal, dan sebagainya.

2.1.4 Pelaksanaan Anggaran

2.1.4.1 Pengertian Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011) dalam Ramdhani dan Indi (2017). Proses pelaksanaan meliputi pengaturan terhadap penggunaan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanaannya.

Pelaksanaan anggaran menurut Nurkholis dan Khusaini (2019:49) adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis maupun kronologis. Pelaksanaan anggaran yang tepat tergantung pada banyak faktor yang di antaranya adalah kemampuan untuk mengatasi

perubahan dalam lingkungan kebijakan dan kemampuan satuan kerja untuk melaksanakannya.

Pelaksanaan anggaran menurut (Anisa, 2017) merupakan upaya-upaya untuk merealisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat. Pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas yang dilaksanakan, yang terkait dengan penggunaan anggaran. Menurut Gagola et al (2017) menjelaskan Pelaksanaan anggaran merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan anggaran akan tercapai dengan baik apabila perencanaan anggaran sudah dilaksanakan dengan baik.

2.1.4.2 Mekanisme dan Karakteristik Pelaksanaan Anggaran

Lebih lanjut Gagola et al (2016) menjelaskan Pelaksanaan anggaran baru dapat dilaksanakan setelah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD menjadi dasar dalam pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga menyatakan pelaksanaan anggaran juga menggunakan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD dan Surat Permintaan Pembayaran.
- 2 Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat

permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD. Sementara Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

3. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung

Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Kemudian SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD (Badan Pengelolaan dan kekayaan daerah) untuk di revisi dan disahkan. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau berkedudukan sebagai kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Setelah disahkan maka PPKD menerbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana), artinya dana untuk program kerja SKPD telah tersedia di kas daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan setiap pengeluaran kas daerah harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Pengeluaran kas tersebut tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen-dokumen yang digunakan untuk pencairan dana adalah sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran

2. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD

Menurut Ratag et al., 2019). pelaksanaan anggaran juga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Kemudian LKPP dalam Kuswandi *et al.*, (2021:13) menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah

kegiatan untuk mendapatkan barang, atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Yang dimaksud barang disini meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun privat. Barang/jasa publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum, sedangkan barang/jasa privat merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau kelompok tertentu.

2.1.4.3 Persoalan-Persoalan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Anggaran

Persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran menurut Ratag et al., 2019) diantaranya adalah :

1. Pertama, persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja seperti: keterlambatan penetapan surat keputusan tenaga pengelola keuangan, kebiasaan pengelola anggaran menunda pekerjaan, serta tidak adanya *reward* dan *punishment* bagi keberhasilan/kegagalan pengelolaan keuangan di satker menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran
2. Kedua, pengadaan barang dan jasa. Terkait proses pengadaan barang/jasa, sikap kehati-hatian pejabat pengadaan barang/jasa dalam mengambil tindakan, kurangnya panitia pengadaan yang bersertifikat, dan buruknya pelaksanaan pengadaan barang/jasa di SKPD juga memberi kontribusi bagi lambatnya penyerapan anggaran

3. Ketiga, mekanisme pembayaran. Persoalan yang terjadi dalam mekanisme pembayaran disebabkan oleh perencanaan kas yang tidak akurat, sehingga satker tidak memiliki pedoman yang tepat kapan anggaran akan direalisasikan. Selain itu, pencairan pembayaran kepada pihak rekanan tidak optimal/sering terlambat disebabkan pihak rekanan tidak mengajukan tagihan atau karena dokumen bukti tagihan yang tidak lengkap.

2.1.4.4 Indikator Pelaksanaan Anggaran

Proses pelaksanaan meliputi pengaturan terhadap penggunaan alat-alat yang di perlukan, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanaannya (Anisa, 2017). Menurut Harriyanto dalam Harahap *et al* (2020) dalam pelaksanaan anggaran, lambatnya penyerapan anggaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- 1 Persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja.
- 2 Proses pengadaan barang/jasa.
- 3 Mekanisme pembayaran (pencairan anggaran).

Pelaksanaan anggaran menurut Gagola *et al* (2017) diukur dengan indikator penunjukan SK pejabat perbendaharaan, budaya kerja, proses penyelesaian administrasi, jadwal anggaran kas, proses verifikasi SPM. Pelaksanaan anggaran menurut Anisa (2017) menggunakan indikator ukur sebagai berikut:

- 1 Penunjukan SK Perbendaharaan
- 2 Budaya Kerja
- 3 Penyelesaian Administrasi
- 4 Jumlah pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa
- 5 Proses pemeriksaan dokumen kontrak
- 6 Penentuan harga perkiraan sendiri (HPS)
- 7 Kapasitas pihak rekanan
- 8 Proses Verifikasi SPM
- 9 Jadwal Anggran Kas
- 10 Pencairan uang kepada pihak rekanan

2.2 Penelitian Sebelumnya

Harahap *et al.*, (2020) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai). Hasil menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Sementara itu, pencatatan administrasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Pengaruh variabel independen untuk menggambarkan variabel dependen adalah 43,4% sedangkan sisanya 56,6% dipengaruhi oleh variabel lain

Putri *et al.*, (2017) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada SKPD Di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: variabel perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, dan variabel komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran

Anisa, Indi Zaenur (2017) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Hasil penelitian terdapat pengaruh Positif dan Signifikan perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Terdapat pengaruh Positif dan Signifikan kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Alumbida *et al.*, (2016) Pengaruh Perencanaan, Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menjelaskan perencanaan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah. Komitmen Organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah.

Malahayati *et al.*, (2015) Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian baik secara simultan maupun parsial mendukung hipotesis bahwa kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran SKPD pada Pemerintah Kota Banda Aceh.

Ringkasan hasil penelitian sebelumnya serta perbedaan dan persamaan dengan penelitian sekarang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti/Judul	Model	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota	Analisis regresi	perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi SDM aparatur berpengaruh positif terhadap penyerapan	- Variabel dependent: Penyerapan anggaran - Variabel independent: perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran,	- Lokasi dan objek penelitian - Sampel penelitian. - Variabel pencatatan administrasi dan kompetensi

No	Judul/ Peneliti	Model	Hasil	Persamaan	Perbedaan
----	-----------------	-------	-------	-----------	-----------

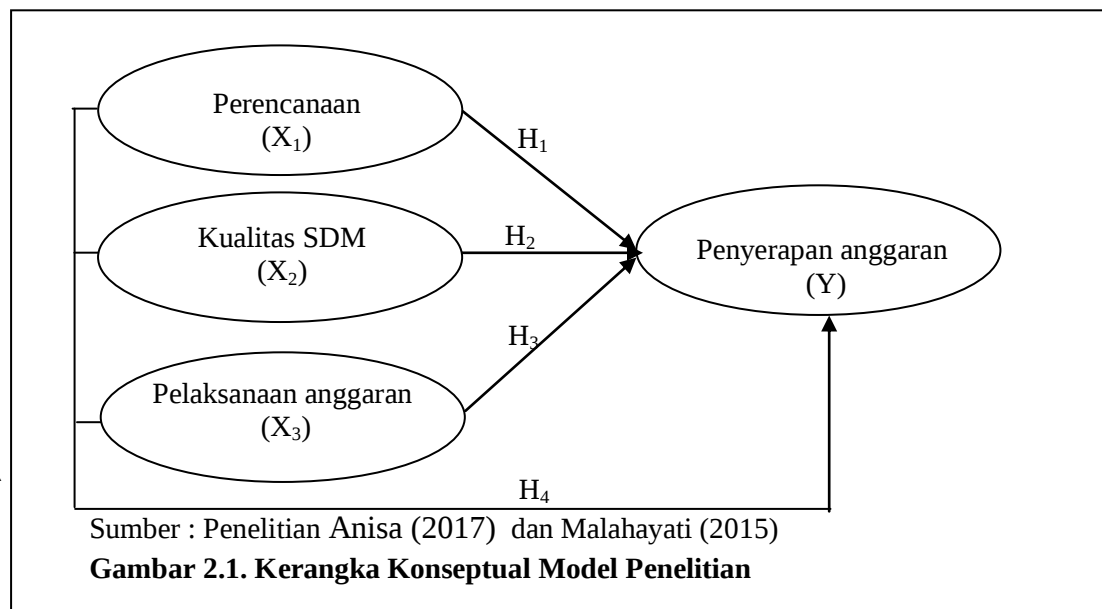
	Dumai). (Harahap <i>et al.</i> , 2020)		anggaran. Pencatatan administrasi tidak berpengaruh.	pencatatan administrasi, kompetensi SDM - Model analisis	SDM
2	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada SKPD Di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali) (Putri <i>et al.</i> , 2017)	Analisi regresi	perencanaan anggaran, kualitas SDM dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.	- Variabel dependent: Penyerapan anggaran - Variabel independent: perencanaan anggaran, kualitas SDM, komitmen organisasi - Model analisis	- Lokasi dan objek penelitian - Sampel penelitian. - Variabel komitmen organisasi
3	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. (Anisa (2017)	Analisi Regresi Linier	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perencanaan anggaran, kualitas SDM dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran	- Variabel dependent: penyerapan anggaran - Variabel independent: perencanaan anggaran, kualitas SDM, dan pelaksanaan anggaran, - Model analisis	- Lokasi dan objek penelitian - Sampel penelitian. .
4	Pengaruh Perencanaan, Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. (Alumbida <i>et al.</i> , 2016)	Analisi Regresi Linier	perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Kapasitas SDM dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran.	- Variabel dependent: Penyerapan anggaran - Variabel independent: perencanaan anggaran, kapasitas SDM, komitmen organisasi - Model analisis	- Lokasi dan objek penelitian - Sampel penelitian. - Variabel kapasitas SDM dan komitmen organisasi
5	Malahayati <i>et al.</i> , (2015) Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada	Analisi Regresi Linier	Baik secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran, kapasitas SDM dan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran	- Variabel dependent: penyerapan anggaran - Variabel independent: perencanaan anggaran, kapasitas SDM, dan pelaksanaan	- Lokasi dan objek penelitian - Sampel penelitian. - Variabel kapasitas SDM .

	Pemerintah Kota Banda Aceh. (Permadi dan Aniek, 2015)			anggaran, Model analisis	
--	--	--	--	--------------------------------	--

Sumber: Data Diolah Tahun 2021

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dan pendapat para ahli tersebut di atas, maka Kerangka Konseptual Model Penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1



2.4 Hipotesis

Berdasarkan anggapan dasar sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

- H₁: Diduga perencanaan berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- H₂: Diduga kualitas sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah .
- H₃: Diduga pelaksanaan anggaran secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

H₄: Diduga perencanaan, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah .

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

3.1.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan diteliti, maka penelitian ini termasuk penelitian kausal. Penelitian kausal menurut Sugiyono (2012:4) adalah pengujian hubungan sebab akibat, jadi disini ada variabel independen (yang mempengaruhi) yang mempengaruhi variabel dependen (dipengaruhi). Tujuan utama dari riset kausal ini adalah untuk membuktikan hubungan sebab akibat guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas berupa perencanaan, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran.
2. Variabel terikat berupa penyerapan anggaran .

1.1.3 Horizon Waktu

Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Satu Tahap (*One Shot Study*). Studi ini merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan sekaligus. Data yang dikumpulkan dapat berupa data dari satu atau beberapa subyek penelitian yang mencakup satu atau beberapa periode waktu (hari, minggu, bulan atau tahun). Tipe ini lebih menekankan pada frekuensi tahap

pengumpulan data, yaitu satu tahap dan sekaligus (Indriantoro dan Supomo (2018:94).

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis merupakan elemen yang mempengaruhi proses pemilihan, pengumpulan dan analisis data (Indriantoro dan Supomo, 2018:94). Unit analisis dalam penelitian ini berfokus pada konsumen individu yang melakukan pembelian produk Vitacimin pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah .

3.2. Populasi dan Penarikan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:55). Sementara Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:81). Populasi penelitian ini adalah pejabat pemerintah di seluruh SKPD di Kabupaten Aceh Tengah yang berjumlah sebanyak 81 pejabat di 27 SKPD atau ekuivalen dimana pada masing-masing SKPD terpilih 3 (tiga) sampel. Jumlah sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2.
Populasi dan Sampel Penelitian

No	DINAS	Jumlah Sampel
1	SEKRETARIS	
	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar	3
	Sekretaris DPRD	3
2	DINAS	
	Dinas Syariat Islam	3
	Dinas Pendidikan	3
	Dinas Kesehatan	3
	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	3
	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Telematika	3

	Dinas Peternakan	3
	Dinas Perindag, Koperasi Dan UKM	3
	Dinas Kelautan dan Perikanan	3
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	3
	Dinas Pertambangan dan Energi	3
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3
	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	3
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3
3	BADAN	
	Badan Kesbangpolinmas	3
	Badan Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Anak	3
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3
	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	3
	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	3
	Badan Pertamanan, Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3
	Badan Penyuluhan dan Ketahanan tanaman pangan	3
4	KANTOR	
	Kantor Arsip Dan Perpustakaan	3
	Satuan Polisi Pamong Praja Dan WH	3
	Kantor Pembinaan Pendidikan	3
	Kantor Pelayanan Satu Pintu	3
	Jumlah	81

Sumber: Kantor Sekretariat Kabupaten Aceh Tengah, 2021

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil pembagian kuesioner. Menurut Indriantoro dan Supomo (2018:146), data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama (tidak melalui media perantara). Pengumpulan data kuesioner secara personal (*Personally Administered Questionnaires*) menurut Indriantoro & Supomo (2018 :154) yaitu penggunaan teknik pengisian jawaban yang disampaikan dan dikumpulkan langsung dari responden. Kuesioner diberikan kepada responden dengan tujuan agar responden dapat memberikan jawaban sesuai dengan tema sentral penilaian ini. Selanjutnya kuesioner diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingan model skala interval. Skala interval menurut Indriantoro dan Supomo (2011 :104) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Susunan Skala Interval

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Kurang setuju	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

Sumber: Indriantoro dan Supomo, (2018 :104)

3.4 Operasional Variabel

Penelitian ini melibatkan empat variabel masing-masing tiga variabel bebas yaitu perencanaan anggaran (X_1), kualitas sumber daya manusia (X_2) dan pelaksanaan anggaran (X_3) satu variabel terikat yaitu penyerapan anggaran (Y). Karakteristik variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
Operasionalisasi dan Indikator Variabel

[illegible]

Lanjutan Tabel 3.1

No	Variabel	Definisi	Indikator	Ukuran	Skala	Item
	Independen					
		rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. (Zarinah dalam Harahap (2020))	5 Prioritas, 6 Keterbukaan		Interval	C4 C5 C6
3	Kualitas sumber daya manusia (X ₂)	sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif- generative-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti <i>intelligence, creativity</i> , dan <i>imagination</i> , tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, energi otot, dan sebagainya (Ndraha, 1999:12) dalam Sutrisno (2017:4)	1 Memiliki pengetahuan penuh tentang tugas 2 Memiliki pengetahuan (knowledges) yang diperlukan 3 Mampu melaksanakan tugas-tugas dengan keahlian/keterampilan (skills) yang diperlukan. 4 Bersikap produktif, inovatif/kreatif, mau bekerja sama	1-5	Interval	D1 D2 D3 D4
4	Pelaksanaan anggaran (X ₃)	suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan anggaran akan tercapai dengan baik apabila perencanaan anggaran sudah dilaksanakan dengan baik.(Gagola <i>et al</i> (2016))	1 Penunjukan SK pejabat perbendaharaan 2 Budaya kerja, 3 Proses penyelesaian administrasi, 4 Jadwal anggaran kas 5 Proses verifikasi SPM.	1-5	Interval	E1 E2 E3 E4 E5

3.5 Teknik Analisis Data

Peralatan analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Regresi yaitu suatu bentuk peralatan analisis yang dirumuskan dalam bentuk persamaan matematis yang berguna untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (*independent variabel*) dan variabel terikat (*dependent variabel*). Rancangan analisis regresi linier berganda menurut Sudarmanto (2011:59) dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Penyerapan anggaran
- X₁ = Perencanaan
- X₂ = Kualitas sumber daya manusia
- X₃ = Pelaksanaan anggaran
- b₁..b₃= Parameter Regresi
- a = *Intercep*
- e = *Error Term*

3.6. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

3.6.1 Pengujian Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kebenaran suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan benar apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara nyata. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefisient of Corelation* dengan bantuan program SPSS, dengan tingkat signifikansi di bawah 5%. Jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperbolehkan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *Product Moment* dimana hasilnya menunjukkan bahwa item pertanyaan mempunyai korelasi di atas 5% atau secara statistik terdapat konsistensi

internal (*internal consistency*) yang berarti item-item pertanyaan dapat mengukur aspek yang sama. Ini berarti bahwa setiap data yang ditunjukkan adalah valid.

3.6.2 Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Untuk menguji keandalan alat ukur dalam penelitian ini penulis menggunakan uji reliabilitas internal, dengan cara menganalisis data dari satu kali pengketesan saja. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Metode reliabilitas yang digunakan adalah *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS Versi 22. Alat ukur yang bagus harus :

1. Dapat diandalkan
2. Hasil pengukurannya bisa diramalkan
3. Dapat menunjukkan tingkat ketepatan

Cronbach Alpha menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan *Cronbach Alpha* adalah sebesar 0,60.

3.7. Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara simultan dan secara parsial menggunakan *parameter regresi linier* berganda sebagaimana terlihat pada pembahasan berikut:

3.7.1 Pengujian Secara Parsial

$H_{01}: \beta_1=0$; Perencanaan tidak berpengaruh secara positif terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Tengah

$H_{a1}: \beta_1 \neq 0$; Perencanaan berpengaruh secara positif terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Tengah.

$H_{o2}: \beta_2 = 0$; Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara positif terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Tengah.

$H_{a2}: \beta_2 \neq 0$; Kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Tengah.

$H_{o3}: \beta_2 = 0$; Pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh secara positif terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Tengah

$H_{a3}: \beta_2 \neq 0$; Pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Tengah.

3.7.2 Pengujian Secara Simultan

$H_{o4}: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$; Perencanaan, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh secara positif terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Tengah.

$H_{a4}: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0 (\beta_i \neq 0)$; Perencanaan, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran berpengaruh secara positif terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Tengah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah keadaan atau ciri-ciri pejabat daerah dan bendaharawan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Sekretaris, kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendaharawan yang berjumlah seluruhnya sebanyak 81 orang. Mereka memiliki tingkat umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan kepangkatan dan masa kerja yang berbeda. Karakteristik tersebut mempengaruhi mereka dalam berpendapat. Karakteristik responden pada SKPD Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Karakteristik		Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Umur	41-45	36	44.4
		46-50	30	37.0
		>50	15	18.5
		Total	81	100,0
2	Kelamin	Laki-laki	66	81,5
		Perempuan	15	18,5
		Total	81	100,0
3	Pendidikan	S1	63	77.8
		S2	18	22.2
		Total	81	100,0
4	Kepangkatan	IIIc-IIIId	33	40.7
		IVa-IVb	25	30.9
		IVc-IVd	23	28.4
		Total	81	100,0
5	Masa kerja	16-20 Tahun	36	44.4
		> 20 Tahun	45	55.6
		Total	81	100,0

Sumber :Data Primer (diolah), 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan sebahagian besar atau 44,4% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah berumur antara 41-45 tahun. Ada 18,5% dari jumlah pajabat daerah dan bendaharawan yang terdata dengan umur lebih dari 50 tahu. Selebihnya 37,0% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata dengan umur antara 46–50 tahun. Jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah sebahagian besar atau 81,5% berjenis kelamin laki-laki, selebihnya 18,5% berjenis kelamin perempuan.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebahagian besar atau 77,8% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah dengan latar pendidikan S1. Ada 22,2% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan dengan tingkat pendidikan S2. Pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah sebahagian besar atau 55,6% telah bekerja lebih dari 20 tahun. Ada 44,4% dari jumlah pejabat yang terdata dengan masa kerja antara 16-20 tahun.

Dengan tingkat pendidikan dan masa kerja tersebut maka pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah sebahagian besar atau 40,7% dengan golongan kepangkatan antara IIIc-IIIId. Ada 28,4% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata dengan golongan kepangkatan antara IVc-IVd. Selebihnya atau 30,9% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata dengan golongan kepangkatan antara IVa-IVb.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Variabel Penyerapan Anggaran

Variabel penelitian penyerapan anggaran dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Gambaran Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah

No	Penyerapan anggaran	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Realisasi anggaran setiap tahun telah dilaksanakan secara efektif atau rata-rata di atas 80% dari rencana anggaran.	0	0,0	0	0,0	42	51.9	27	33.3	12	14.8	3,630
2.	Rencana dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Renja 5 (lima) tahun, tidak menyimpang dari indikator kinerja yang ingin dicapai (Renstra).	0	0,0	0	0,0	34	42.0	35	43.2	12	14.8	3,728
3.	Pencairan anggaran untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan anggaran	0	0,0	0	0,0	36	44.4	42	51.9	3	3.7	3,593
	Rerata											3,650

Sumber : Data Primer (diolah), 2022

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan tingkat penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,650 unit skala likert. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang penyerapan anggaran tersebut. Kalaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Konsistensi dalam pelaksanaan program/kegiatan menjadi indikator tingkat penyerapan anggaran yang terbaik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kabupaten Aceh Tengah dengan nilai sebesar 3,728 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati nilai 4 (skor untuk jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju jika rencana dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Renja 5 (lima) tahun, tidak menyimpang dari indikator kinerja yang ingin dicapai (Renstra).

Sementara ketepatan jadwal penarikan anggaran menjadi indikator tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah dengan nilai jawaban 3,593 unit skala likert. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya namun mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju jika pencairan anggaran untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan anggaran.

4.2.2 Variabel Perencanaan Anggaran

Variabel penelitian perencanaan anggaran dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Gambaran Tingkat Perencanaan Anggaran Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah

No	Perencanaan Anggaran	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara menyeluruh untuk semua kegiatan	0	0,0	0	0.0	39	48.1	30	37.0	12	14.8	3,667
2.	Perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara terperinci untuk berbagai kegiatan baik kegiatan utama maupun pendukung.	0	0,0	0	0.0	39	48.1	30	37.0	12	14.8	3,667
3.	Perencanaan anggaran telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku	0	0,0	6	7.4	24	29.6	39	48.1	12	14.8	3,704

4.	Perencanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan perubahan-perubahan yang akan dan telah terjadi di lingkungan sosial masyarakat.	0	0,0	3	3.7	45	55.6	24	29.6	9	11.1	3,481
5	Perencanaan anggaran telah dilaksanakan dengan mengutamakan kegiatan yang lebih dibutuhkan dan memberi dampak dan manfaat besar.	0	0,0	6	7.4	33	40.7	33	40.7	9	11.1	3,556
6	Informasi perencanaan anggaran telah dipublikasi melalui berbagai media masa.	0	0,0	9	11.1	54	66.7	18	22.2		0.0	3,111
	Rerata											3,531

Sumber : Data Primer (diolah), 2022

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan perencanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,531 unit skala likert. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju) yang menjelaskan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang perencanaan anggaran tersebut. Kalaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Disiplin anggaran menjadi indikator tingkat perencanaan anggaran yang terbaik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah dengan nilai jawaban sebesar 3,704 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju jika perencanaan anggaran telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara keterbukaan menjadi indikator perencanaan anggaran yang masih rendah dengan nilai jawaban sebesar 3,111 unit skala likert. Nilai tersebut lebih

rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat dan bendaharawan yang terdata menjawab kurang setuju jika informasi perencanaan anggaran telah dipublikasi melalui berbagai media masa.

4.2.3 Variabel Kualitas SDM

Variabel penelitian kualitas SDM dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Gambaran Kualitas SDM Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah

No	Kualitas SDM	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Pejabat daerah dan bendaharawan memiliki pengetahuan yang cukup tentang visi, misi dan program kerja instansi.	0	0,0	0	0.0	27	33.3	54	66.7	0	0.0	3,667
2.	Pejabat daerah dan bendaharawan memiliki pengetahuan yang diperlukan Instansi untuk perencanaan program kerja yang lebih bermanfaat dan memberi dampak beesar bagi masyarakat.	0	0,0	9	11.1	18	22.2	54	66.7	0	0.0	3,556
3.	Pejabat daerah dan bendaharawan yang diangkat sebagai Kabid/Kasi memiliki pengetahuan yang relevan dengan bidang kerja dan Tupoksi Bidang Kerja masing-masing.	0	0,0	3	3.7	21	25.9	54	66.7	3	3.7	3,704
4.	Pejabat daerah dan bendaharawan memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai hal-hal yang baru yang akan dibutuhkan dalam program kerja instansi.	0	0,0	42	51.9	27	33.3	12	14.8	0	0.0	3,481
	Rerata	3,602										

Sumber : Data Primer (diolah), 2022

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dijelaskan kualitas SDM pejabat daerah dan bendaharawan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,602 unit skala likert. Nilai tersebut

mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju) yang menjelaskan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang kualitas SDM tersebut. Kalaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Kemampuan melaksanakan tugas-tugas dengan keahlian/keterampilan (skills) yang diperlukan menjadi indikator kualitas SDM yang terbaik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah dengan nilai sebesar 3,704 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju jika Pejabat daerah dan bendaharawan yang diangkat sebagai Kabid/Kasi memiliki pengetahuan yang relevan dengan bidang kerja dan Tupoksi Bidang Kerja masing-masing.

Sementara bersikap produktif, inovatif/kreatif, mau bekerja sama keterbukaan menjadi indikator kualitas SDM yang masih rendah dengan nilai jawaban 3,482. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat dan bendaharawan yang terdata menjawab kurang setuju jika Pejabat daerah dan bendaharawan memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai hal-hal yang baru yang akan dibutuhkan dalam program kerja instansi.

4.2.4 Variabel Pelaksanaan Anggaran

Variabel penelitian pelaksanaan anggaran dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Gambaran Tingkat Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah

No	Pelaksanaan anggaran	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	SK pejabat perbendaharawan dapat dilaksanakan lebih cepat sebelum program kerja di laksanakan.	0	0,0	3	3.7	39	48.1	30	37.0	9	11.1	3,556
2.	Instansi menggunakan sistem kerja yang modern dan bebas dari kecurangan.	0	0,0	9	11.1	21	25.9	42	51.9	9	11.1	3,630
3.	Proses penyelesaian administrasi proyek (pengadaan barang dan jasa) telah dilaksanakan secara cepat waktu dan sesuai aturan.	0	0,0	9	11.1	27	33.3	36	44.4	9	11.1	3,556
4.	Jadwal anggaran kas (pengamprahan anggaran) telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang di butuhkan.	0	0,0	3	3.7	42	51.9	33	40.7	3	3.7	3,444
5	Proses verifikasi SPM telah dilalsanakan secara cermat sesuai dengan rencana, progress, waktu dan aturan yang ditetapkan.	0	0,0	0	0.0	39	48.1	27	33.3	15	18.5	3,704
	Rerata	3,578										

Sumber : Data Primer (diolah), 2022

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan tingkat pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,578 unit skala likert. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju) yang menjelaskan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang pelaksanaan anggaran tersebut. Kalaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Proses verifikasi SPM menjadi indikator tingkat pelaksanaan anggaran yang terbaik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah dengan nilai jawaban 3,704 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk jawaban setuju). Kondisi ini

menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju jika proses verifikasi SPM telah dilaksanakan secara cermat sesuai dengan rencana, progress, waktu dan aturan yang ditetapkan.

Sementara penjadwalan anggaran kas menjadi indikator pelaksanaan anggaran yang masih rendah dengan nilai jawaban sebesar 3,444 unit skala likert. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat dan bendaharawan yang terdata menjawab kurang setuju jika Jadwal anggaran kas (pengamprahan anggaran) telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang di butuhkan.

4.3. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Sebelum dianalisis lebih lanjut dalam model analissi regresi linier berganda, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dengan menggunakan analisis korelasi person. Uji ini dimaksud untuk mendapatkan data yang sebenarnya sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang terjadi. Kuesioner harus bebas dari kesalahan dalam arti kuesioner dapat memberikan informasi yang relevan mengenai aktivitas dan perialaku yang diteliti.

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefficient of Corelation*. Uji ini menghasilkan nilai dari 0 sampai dengan 1 yang menggambarkan hubungan skor item pertanyaan dengan skor data yang digunakan secara keseluruhan. Kemudian nilai korelasi tersebut hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *product moment* pada tingkat signifikansi 5% dan df sebesar 81 sampel yaitu sebesar 0,220. Hasil Uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas

Indikator		Koefisien Korelasi	Nilai Kritis r N = 81	Keterangan
B1	Penyerapan anggaran (Y)	0,870	0,220	Valid
B2		0,702	0,220	Valid
B3		0,617	0,220	Valid
C1	Perencanaan anggaran (X_1)	0,641	0,220	Valid
C2		0,840	0,220	Valid
C3		0,805	0,220	Valid
C4		0,736	0,220	Valid
C5		0,702	0,220	Valid
C6		0,515	0,220	Valid
D1	Kualitas SDM (X_2)	0,880	0,220	Valid
D2		0,919	0,220	Valid
D3		0,888	0,220	Valid
D4		0,784	0,220	Valid
E1	Pelaksanaan anggaran (X_3)	0,685	0,220	Valid
E2		0,669	0,220	Valid
E3		0,642	0,220	Valid
E4		0,683	0,220	Valid
E5		0,784	0,220	Valid

Sumber :Data Primer (diolah), 2022

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan semua butir pertanyaan yang digunakan untuk pengumpulan data penyerapan anggaran (Y), perencanaan anggaran (X_1), kualitas SDM (X_2) dan pelaksanaan anggaran (X_3) dinyatakan valid atau data yang dikumpulkan telah menggambarkan suatu kenyataan terjadi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya karena nilai koefisien korelasi dari masing-masing nilai atribut yang membentuk variabel tersebut lebih besar dari nilai kritis product-moment pada *level of significant* 5% (0,220) sebagaimana terlihat pada Lampiran 7. Dengan demikian seluruh butir indikator ukur dari butir pertanyaan kuesioner tersebut sudah dapat dipercaya dan dapat dianalisis lebih lanjut.

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi alat ukur dalam menghasilkan data yang dapat dipercaya. Maka dilakukan pengukuran secara

sistematis terhadap instrumen penelitian yaitu angket atau dalam bahasa asing dikenal dengan kuesioner. Uji Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau kepercayaan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban yang diberikan responden. Semakin konsisten jawaban yang diberikan maka akan semakin terpercaya alat ukur yang digunakan.

Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penelitian dilakukan dengan teknik belahan data dengan dukungan rumus koefisien alpha dari Cronbach atau biasa disebut dengan *Cronbach Coefficient Alpha*. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan pada koefisien alpha 0,60 (Priyanto, 2012: 26). Jika derajat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah data lebih besar dari koefisien alpha (α), maka hasil pengukuran dapat dipertimbangkan sebagai alat ukur dengan tingkat ketelitian dan konsistensi pemikiran yang baik. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat Tabel 4.7.

Tabel. 4.7
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Jumlah Atribut	Item Pertanyaan	Nilai Cronbach Alpha	Ket
1	Penyerapan anggaran (Y)	3	B1 s/d B3	0,675	Handal
2	Perencanaan anggaran (X_1)	6	C1 s/d C6	0,805	Handal
3	Kualitas SDM (X_2)	4	D1 s/d D4	0,879	Handal
4	Pelaksanaan anggaran (X_3)	5	B1 s/d B5	0,723	Handal

Sumber :Data Primer (diolah), 2022

Hasil uji reliabilitas terhadap data-data yang digunakan untuk variabel penyerapan anggaran (Y), perencanaan anggaran (X_1), kualitas SDM (X_2) dan pelaksanaan anggaran (X_3), pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah diperoleh nilai alpha masing-masing lebih besar dari standar ukuran koefisien alpha 0,60 (Priyanto, 2012: 26). standar alfa 0,60. Dengan demikian data

yang digunakan untuk ke lima variabel telah dapat di percaya dan telah dapat dianalisis lebih lanjut dalam model analisis regresi.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Koefisien Regresi Linier Berganda

Pengaruh perencanaan anggaran (X_1), kualitas SDM (X_2) dan pelaksanaan anggaran (X_3) terhadap penyerapan anggaran (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah dapat di buktikan dengan perangkat regresi linier berganda dengan mengoperasionalkan 4 (empat) variabel. Penyerapan anggaran (Y) menjadi variabel terikat (*dependent variabel*) yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) variabel bebas (*independent variable*) yaitu perencanaan anggaran (X_1), kualitas SDM (X_2) dan pelaksanaan anggaran (X_3). Hasil output SPSS regresi linier berganda pengaruh variabel bebas dan terikat dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Hasil output SPSS regresi linier berganda pengaruh perencanaan anggaran (X_1), kualitas SDM (X_2) dan pelaksanaan anggaran (X_3) terhadap penyerapan anggaran (Y) dapat dilihat Tabel 4.8

Tabel 4.8
Hasil Analisis Model Regresi Pengaruh Perencanaan Anggaran
Kualitas SDM dan Pelaksanaan Anggaran
Terhadap Penyerapan Anggaran

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	0,820	0,333	
	Perencanaan anggaran	0,252	0,111	0,265
	Kualitas SDM	0,196	0,097	0,211
	Pelaksanaan anggaran	0,345	0,093	0,367

Sumber: Data Primer (diolah), 2022

Dari hasil out put SPSS pada Tabel di atas dapat dibuat garis persamaan linier adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,820 + 0,252X_1 + 0,196X_2 + 0,345X_3 + \varepsilon$$

Persamaan di atas menjelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta penyerapan anggaran sebesar 0,820 menjelaskan jika perencanaan anggaran (X_1), kualitas SDM (X_2) dan pelaksanaan anggaran (X_3) tidak mengalami perubahan, maka penyerapan anggaran (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah secara konstan berada pada posisi 0,820 unit skala likert. Kondisi ini menandakan penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah masih tergolong rendah atau di bawah nilai 1.
2. Koefisien regresi pengaruh perencanaan anggaran adalah sebesar 0,252 menjelaskan setiap adanya kenaikan satu unit skala likert pada variabel perencanaan anggaran maka akan dapat meningkatkan penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah sebesar 0,252 unit skala likert. Kondisi ini disebabkan penjabaran dan penetapan rencana anggaran yang jelas dan sesuai dengan kemampuan serta didukung oleh komitmen yang kuat akan dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan (Ferdinan et al., 2020). Perencanaan yang akurat akan memudahkan tahap pelaksanaan anggaran dan memungkinkan tercapainya target secara efektif. Sebaliknya, ketidaktepatan dalam perencanaan mengakibatkan sulitnya pelaksanaan anggaran yang berdampak pada lambatnya proses penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran (Ratag et al., 2019).
3. Koefisien regresi pengaruh kualitas SDM sebesar 0,196, menjelaskan setiap terjadinya kenaikan satu unit skala likert pada kualitas SDM maka akan dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah sebesar 0,196 unit skala likert. Kondisi ini disebabkan pejabat yang memiliki kemampuan SDM yang baik akan dapat mengatasi berbagai masalah dan dapat bertanggungjawab atas setiap program kerja dan kegiatan yang

dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan anggaran anggaran (Alfayuni dan Neneng, 2021).

4. Koefisien regresi pengaruh pelaksanaan anggaran adalah sebesar 0,345 menjelaskan setiap terjadinya kenaikan satu unit skala likert dalam pelaksanaan anggaran maka akan dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah sebesar 0,345 unit skala likert. Kondisi ini disebabkan pelaksanaan anggaran yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan pengadaan barang dan jasa memegang peran penting dalam merealisasikan rencana dari program kerja SKPD meliputi bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya, dimana tempat pelaksanaannya dan siapa yang melaksanakannya sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai (Ferdinan et al., 2020)..

4.4.2 Koefisien Korelasi dan Determinasi

Pengaruh linier antara perencanaan anggaran, kualitas SDM dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran selalu memiliki hubungan secara simultan yang dapat di buktikan dengan koefisien korelasi berganda dan koefisien diterminansi. Koefisien ini menjelaskan keeratan hubungan keseluruhan variabel bebas secara serentak dengan variabel tak bebas. Nilai korelasi bergerak antara -1 sampai dengan +1 dan semakin mendekati nilai 1 atau sama dengan 1 maka korelasi antara variabel akan semakin kuat atau sebaliknya. Sedangkan koefisien dterminasi berganda adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya pengaruh secara serentak variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Hubungan variabel bebas (perencanaan anggaran (X_1), kualitas SDM (X_2) dan pelaksanaan anggaran (X_3)) dengan variabel terikat yaitu penyerapan anggaran (Y) dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Hasil Analisis Korelasi dan Korelasi Diterminasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,701	0,492	0,472

Sumber: Data Primer (diolah), 2022

Koefisien korelasi R sebesar 0,701 menjelaskan terdapat hubungan yang positif antar variabel bebas yaitu perencanaan anggaran (X_1), kualitas SDM (X_2) dan pelaksanaan anggaran (X_3) dengan penyerapan anggaran (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah dengan keeratan hubungan adalah 0,701 atau 70,10%, artinya setiap terjadinya kenaikan 100% secara serentak dalam perencanaan anggaran, kualitas SDM dan pelaksanaan anggaran maka akan dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah sebesar 0,701%. Hubungan tersebut tergolong kuat dengan keeratan hubungan antara 0,60% – 0,799% (Sugiyono, 2012).

Koefisien determinasi R Square sebesar 0,492 menjelaskan, peran variabel perencanaan anggaran (X_1), kualitas SDM (X_2) dan pelaksanaan anggaran (X_3) dalam mempengaruhi penyerapan anggaran (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah adalah sebesar 0,492 atau 49,2%. Sementara sisa (nilai residu) dari peran variabel tersebut sebesar 0,508 atau 50,80% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

4.4.3 Pengujian Hipotesis

4.4.3.1 Pengujian Hipotesis Secara Simultan

H_1 : Nilai $\beta_1=0,252$, $\beta_2= 0,196$, dan $\beta_3= 0,345$ berdasarkan nilai tersebut maka $\beta_1=\beta_2=\beta_3\neq 0$ ($\beta_i \neq 0$), sehingga dapat diuraikan bahwa hipotesis nul (H_0) di tolak, dan hipotesis alternatif (H_a) di terima. Artinya perencanaan anggaran, kualitas

SDM dan pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anisa (2017) dengan judul pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten yang berhasil membuktikan bahwa perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

4.4.3.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial

H₂: Nilai $\beta_1 = 0,252$, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis nul (H₀) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Artinya perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anisa (2017) dengan judul pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten yang berhasil membuktikan bahwa perencanaan anggaran secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

H₃: Nilai $\beta_2 = 0,196$, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis nul (H₀) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Artinya kualitas SDM berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anisa (2017) dengan judul pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran

terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten yang berhasil membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

H₄: Nilai $\beta_3 = 0,345$, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis nul (H_0) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Artinya pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anisa (2017) dengan judul pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten yang berhasil membuktikan bahwa perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

4.5 Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini telah menimbulkan implikasi yang luas bagi semua pihak khususnya bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah sebagai tempat dilakukannya penelitian. Penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah telah terlaksana secara baik. Kondisi ini disebabkan secara nyata oleh adanya perencanaan anggaran yang baik, adanya dukungan SDM Aparatur yang berkualitas serta terlaksanakannya rencana anggaran dengan baik. Ketiga variabel tersebut berpengaruh secara nyata terhadap penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah terutama variabel perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang sangat berperan besar dalam mempengaruhi penyerapan anggaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah.
2. Kualitas SDM berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah.
3. Pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah.
4. Secara simultan perencanaan anggaran, kualitas SDM dan pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan beberapa kelemahan yang ditemukan dari hasil penelitian maka dapat disarankan beberapa saran antara lain:

1. Perencanaan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah perlu dilaksanakan secara lebih berkualitas karena pengaruhnya yang besar terhadap penyerapan anggaran. Kelemahan perencanaan anggaran terutama pada aspek keterbukaan harus dapat di atasi.
2. Pelaksanaan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah perlu direalisasikan secara lebih efektif karena pengaruhnya yang

besar terhadap penyerapan anggaran. Kelemahan pelaksanaan anggaran terutama pada aspek penjadwalan anggaran kas harus dapat di atasi sehingga seluruh pekerjaan dalam pengadaan barang daan jasa akan lebih lancar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Almalani, Luqman (2019) Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Terhadap Peningkatan Kinerja Melalui Pelatihan Dan Motivasi Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Jurnal Ilmu Manajemen (JIMMU) Volume 4 Nomor 1 Hal 72:86 Pascasarjana Universitas Islam Malang
- Alfayuni, Firda dan Neneng Dahtiah (2021) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran dan Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Cirebon). *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung, Vol 4 No 5 Hal 1121-1127*. Politeknik Negeri Bandung, Bandung
- Anisa, Indi Zaenur, Anisa (2017) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa Volume 2 No 1* Biro Umum Provinsi Banten.
- Ani, Lely., JMV Mulyadi., Dwi Pratowo (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Dengan Perencanaan Anggaran Sebagai Pemoderasi Pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2013-2017. *Ekobisman Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen Vol 5 No 1* Universitas Pancasila.
- Anfujatin (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada Skpd Kabupaten Tuban *DIA, Jurnal Administrasi Publik Vol. 14, No. 1* Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Arif Soyan Mirrian et.al (2019) *Manajemen Pemerintah*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2011). *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: Paris Review
- Barthos Basir. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Asara.
- Bastian, Indra (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.
- Elim, Meyulinda Aviana., Deasy Susana Ndaparoka², Thobias Elianus David Tomasowa 2018 Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Kupang *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Audit Vol. 3 No. 2*,
- Fajar, Nurul dan Muhammad Arfan (2017). Analisis Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol. 10 No. 2*, Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

- Hadiutomo, Kusno (2021) *Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Dan Terdesentralisasi*. Yogyakarta: Deepublish
- Hantono, Lakharis Inuzula, Sri Apriyanti Husain (2021) *Akuntansi Sektor Publik*. Jawa Barat Media Sain Indoensia.
- Harahap, Sasmita Atika Sari., Taufeni Taufik dan Nurazlina (2020) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 13, No. 1* Universitas Riau, Program Studi Akuntansi.
- Handajani and L. Effendy (2018)., "Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah," *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, vol. 19, pp. 76-91.
- Halim, Abdul, & Muhammad Iqbal, (2017). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
- Halim, Abdul. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harefa, Mandala., Sony Hendra., Permana., Dewi Restu Mangeswuri., Hilma Meilani (2017) *Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Untuk Akuntansi Dan Manajemen”, Yogyakarta: BPFE
- Kuswandi, Sony., Astri Rumondang Banjarnahor, Candra Mochamad Surya ·(2021) *Manajemen Aset dan Pengadaan*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis
- Gagola, Ledy S., Jullie J. Sondakh dan Jessy D.L. Warongan (2017) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud *Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Sam Ratulangi*
- Mamik. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Jawa
- Mardiasmo, ,(2018)., *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Nasution, Dito Aditia Dharma (2019) *Akuntansi Sektor Publik (Mahir Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah Keuangan*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nurkholis, Moh. Khusaini · (2019) *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: TIM UB Press.

Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*

Pasolong, Harbani. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta.

Putri, Kadek Mia Ranisa., Gede Adi Yuniarta., Made Aristia Prayudi (2017) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada SKPD Di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali) e-Journal *Akuntansi Program* Vol: 8 No: 2 Jurusan Akuntansi Program Universitas Pendidikan Ganesha.

Ramdhani, Dadan dan Indi Zaenur Anisa (2017) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol.10 No.1* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ramadhani, Rifka dan Mia Angelina Setiawan (2019) Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No. 2 Hal 710-726*. Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Ratag, Wieske Anneleen., Anderson G. Kumenaung., dan Daisy S.M. Engka (2019) Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Lingkungan Iniversitas Sam Ratulangi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.20 No.3 Hal 78-92*

Rindawati, Septi (2021) *Responsibilitas Pengelolaan APBD*. Bandung Media sain Indoensia

Sinaga, Edward James ,(2018). Analisis Lemahnya Penyerapan Anggaran Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, *Jurnal Rechtvinding Vol 5 No 2* Pusat Pengkajian dan Pengembangan, Kemnetrian Hukum mdan HAM.

Santoso, Singgih. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media. Komputindo

Saptari, Winedar., Nugroho Mawardi Wibowo dan Muninghar. (2019). “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi Dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep”. *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik) Vol. 2 No. 3* Universitas Wijaya Putra Surabaya

Sedarmayanti (2017) *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta

- Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Refika.
- Sujatmika (2020) *Menuju Penganggaran Daerah Berdasarkan Pancasila*. Malang Peneleh.
- Sutrisno, Edy. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana.
- Syafii Inu Kencana (2017) *Manajemen Pemerintahan*, Pustaka Reka Cipta, Jawa Barat.
- Tisnawati, Ernie Sule dan Saefullah Kurniawan (2018) *Pengantar Manajemen*. Granada Media, Jakarta.
- Urbinas, Elisabeth (2020) Pengaruh Faktor Kepemimpinan, Kompetensi Dan Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapura. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 2 No 3 Hal 1-12*.
- Yuliani, Irma (2019) *Pengaruh Belanja Dan Investasi Terhadap Kemandirian Dan Pertumbuhan Ekonomi*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indoensia
- Zulaikah, Binti dan Dian Imanina Burhany ,(2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Pada Triwulan Iv Di Kota Cimahi *Jurnal Polban Vol 10 No 1 Politeknik Bandung*

KUESIONER

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN , KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Kepada Yth : Bapak/Ibu/Sdr Responden

Bersama ini saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini dibuat dalam rangka penelitian ilmiah. Hanya kesimpulan keseluruhan hasil penelitian yang akan dianalisa. Kerahasiaan informasi akan sangat dijaga. Untuk itu kami sangat mengharapkan bantuan dari seluruh Bapak/Ibu untuk memberikan informasi yang benar . Atas kerjasamanya kami sampaikan rasa terima kasih.

No Sampel :

Keterangan:

Jawablah pertanyaan anda
sebenarnya dengan memberi tanda
(√) pada kotak yang anda anggap benar

A. Identitas Konsumen/Responden

1. Umur : ☐ 25-30 Tahun
☐ 31-35 Tahun
☐ 36-40 Tahun
☐ 41-50 Tahun
☐ >50 Tahun
2. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki
☐ Perempuan
3. Pendidikan : ☐ DIII
☐ S.1
☐ S.2
☐ S.3
4. Masa Kerja : ☐ <10 Tahun
☐ 6-10 Tahun
☐ 11-15 Tahun
☐ 16-20 Tahun
☐ >20 Tahun
5. Gol Pangkat : ☐ IIIa-IIIb
☐ IIIc-IIId
☐ IVa-Ivb
☐ Ivc-Ivd

B. Penyerapan anggaran

1. Realisasi anggaran setiap tahun telah dilaksanakan secara efektif atau rata-rata di atas 80% dari rencana anggaran.
2. Rencana dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Renja 5 (lima) tahun, tidak menyimpang dari indikator kinerja yang ingin dicapai (Renstra).
3. Pencairan anggaran untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan anggaran

Sgt Tdk Setuju	Tidak Setuju	Krg Setuju	Setuju	Sangat Setuju
----------------	--------------	------------	--------	---------------

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

C. Perencanaan anggaran

1. Perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara menyeluruh untuk semua kegiatan
2. Perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara terperinci untuk berbagai kegiatan baik kegiatan utama maupun pendukung.
3. Perencanaan anggaran telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku
4. Perencanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan perubahan-perubahan yang akan dan telah terjadi di lingkungan sosial masyarakat.
5. Perencanaan anggaran telah dilaksanakan dengan mengutamakan kegiatan yang lebih dibutuhkan dan memberi dampak dan manfaat besar.
6. Informasi perencanaan anggaran telah dipublikasi melalui berbagai media masa.

Sgt Tdk Setuju	Tidak Setuju	Krg Setuju	Setuju	Sangat Setuju
----------------	--------------	------------	--------	---------------

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

D. Kualitas sumber daya manusia

1. Pejabat daerah dan bendaharawan memiliki pengetahuan yang cukup tentang visi, misi dan program kerja instansi.
2. Pejabat daerah dan bendaharawan memiliki pengetahuan yang diperlukan Instansi untuk perencanaan program kerja yang lebih

Sgt Tdk Setuju	Tidak Setuju	Krg Setuju	Setuju	Sangat Setuju
----------------	--------------	------------	--------	---------------

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

bermanfaat dan memberi dampak beesar bagi masyarakat.

3. Pejabat daerah dan bendaharawan yang diangkat sebagai Kabid/Kasi memiliki pengetahuan yang relevan dengan bidang kerja dan Tupoksi Bidang Kerja masing-masing.
4. Pejabat daerah dan bendaharawan memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai hal-hal yang baru yang akan dibutuhkan dalam program kerja instansi.

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

E. Pelaksanaan anggaran

1. SK pejabat perbendaharawan dapat dilaksanakan lebih cepat sebelum program kerja di laksanakan.
2. Instansi menggunakan sistem kerja yang modern dan bebas dari kecurangan.
3. Proses penyelesaian administrasi proyek (pengadaan barang dan jasa) telah dilaksanakan secara cepat waktu dan sesuai aturan.
4. Jadwal anggaran kas (pengamprahan anggaran) telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang di butuhkan.
5. Proses verifikasi SPM telah dilalsanakan secara cermat sesuai dengan rencana, progress, waktu dan aturan yang ditetapkan.

Sgt Tdk Setuju	Tidak Setuju	Krg Setuju	Setuju	Sangat Setuju